

B. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR YANG DILAKSANAKAN

1. URUSAN PENDIDIKAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib, terkait dengan pelayanan dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Sesuai kewenangannya, dalam urusan pendidikan ada 6 kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wonosobo yaitu : pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan usia dini dan pendidikan non formal, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/ kota, penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota.

Komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi layanan dasar khususnya pendidikan tertuang dalam salah satu misi RPJMD 2016-2021 yaitu meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata. Berdasarkan misi tersebut, beberapa kebijakan yang akan ditempuh adalah meningkatkan dan pemeratakan akses layanan pendidikan formal dan non formal secara berkeadilan, meningkatkan mutu layanan pendidikan, meningkatkan mutu layanan pendidikan, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan sekolah inklusi.

Pada tahun 2016, pelaksanaan Urusan Pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga sebagai *leading sektornya*.

a. Program dan Kegiatan

Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan kewenangannya mengalokasikan belanja bagi urusan pendidikan. Proporsi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo untuk urusan pendidikan pada tahun 2016 adalah senilai Rp 729.907.351.232 dari total anggaran APBD Kabupaten Wonosobo sejumlah Rp. 1.945.936.335.686,00 atau 37,5% dari total APBD.

Program yang didanai dari anggaran tersebut meliputi; (1) Belanja Langsung yang terdiri dari : Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Program Peningkatan Budaya Baca dan Pengembangan Perpustakaan serta didukung oleh Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; juga (2) Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai. Program dan alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.B.1.1
Program dan Realisasi Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2016

Program	Anggaran	Realisasi
BELANJA	729.907.351.232,00	578.775.697.068,00
BELANJA LANGSUNG	61.826.455.600,00	60.758.844.495,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini	3.388.700.000,00	3.070.969.812,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	42.499.060.000,00	41.922.695.941,00
Program Pendidikan Menengah	5.959.985.000,00	5.959.985.000,00
Program Pendidikan Non Formal	704.600.000,00	702.234.000,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6.316.551.000,00	6.264.616.000,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.290.800.000,00	1.260.060.163,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	980.189.600,00	942.769.364,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	636.570.000,00	586.729.228,00
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	50.000.000,00	48.784.987,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	668.080.895.632,00	518.016.852.573,00
BELANJA PEGAWAI	668.080.895.632,00	518.016.852.573,00
Gaji dan Tunjangan	656.245.895.632,00	507.551.434.998,00
Tambahan Penghasilan PNS	11.834.950.000,00	10.465.417.575,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	50.000,00	-

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2016, diolah

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Anggaran urusan pendidikan mencakup belanja langsung yang penggunaannya terdiri dari 9 program sebagaimana dicantumkan pada tabel IV.B.1.1 dan belanja tidak langsung. Berikut disampaikan uraian penggunaan belanja langsung dan belanja tidak langsung tersebut.

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini

Berdasarkan pembagian kewenangan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai UU 23 tahun 2015 menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang artinya menuntut pemerintah daerah untuk bertanggungjawab atas pelaksanaan pendidikan usia dini di daerahnya. Pendidikan PAUD adalah merupakan jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

IV.B.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Pendidikan yang terbaik bagi anak adalah pendidikan yang dimulai sejak usia dini, karena masa usia dini (0-6 tahun) merupakan masa keemasan (golden age) dimana peran stimulasi lingkungan yang kondusif dan dilakukan dengan cara bermain akan dapat mengembangkan pertumbuhan otak dan seluruh potensi anak. Hal ini berarti bahwa perkembangan yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun pertama sama besarnya dengan perkembangan yang terjadi pada kurun waktu 14 tahun berikutnya. Sehingga periode ini merupakan periode kritis bagi anak, dimana perkembangan yang diperoleh pada periode ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan periode berikutnya hingga masa dewasa.

Program Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan PAUD melalui lembaga PAUD, Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat, serta, berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat, dan jalur informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan

Anggaran Program PAUD bersumber dari APBD Kabupaten dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah yang disalurkan melalui APBD Kabupaten. Sebanyak 4 lembaga PAUD mendapatkan bantuan peningkatan prasarana pendidikan seperti rehab ruang kelas, pembangunan senderan dan pagar keliling serta pembangunan ruang kelas baru. Untuk meningkatkan daya tampung anak-anak, dibangun Unit Gedung Baru (UGB) PAUD di Desa Jetis Pacarmulyo Kecamatan Leksono. Untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan, telah dilaksanakan Pembangunan Senderan dan Pavingisasi Halaman PAUD Al-Falah Dusun Boralan Kel. Garung Kec. Garung (luncuran APBD 2015), dan Penyempurnaan Gedung dan Pagar keliling PAUD Rofiqul A.la Desa Ngadisono Kec Kaliwiro. Pada kelompok TK, Rehab ruang TK ABA Desa Tanjunganom Kecamatan Kepil, Kelas TK ABA VI Sumberan Kec. Wonosobo, TK ABA I Wonosobo, TK ABA III Sruni Kota Kec Wonosobo, Senderan dan Pavingisasi PAUD Muara Kasih dan TK Pertiwi Desa Jangkrikan Rehabilitasi TK ABA Beran Kecamatan Kepil. Selanjutnya, untuk merangsang tumbuh kembang anak, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan anggaran untuk Bantuan Pengadaan APE PAUD TKN Pembina Selomerto.

Secara berjenjang diselenggarakan acara Gebyar PAUD sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan, menggugah serta meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap pentingnya PAUD. Bentuk kegiatan adalah festival keterampilan bermain peserta didik pada program Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-kanak (TK). Untuk meningkatkan kualitas dan motivasi pendidik diselenggarakan Apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD.

2) Program Wajardikdas Sembilan Tahun

Realisasi Program Wajardikdas Sembilan Tahun diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi sekolah dasar dan

IV.B.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

SLTP, peningkatan mutu pembelajaran serta fasilitasi kejuaraan dalam rangka meningkatkan prestasi siswa serta pendidik. Untuk tingkat SD kegiatan Pengadaan sarana penunjang proses pembelajaran sekolah dasar negeri dilaksanakan untuk pengadaan alat peraga pendidikan, alat kesenian dan pengadaan mebel SD yang antara lain diterima oleh SDN 10 Wonoosbo dan SD1 Garung. Sedangkan pembangunan / rehabilitasi ruang kelas dilaksanakan di 17 SD, pembangunan senderan / pagar/pavingisasi di 58 SD negeri serta 11 SD/SMP swasta yang mendapatkan bantuan berupa peningkatan prasarana sekolah seperti rehab ruang kelas, pagar keliling, betonisasi dan pavingisasi. pembangunan ruang perpustakaan untuk 47 SD dan yang tidak kalah penting sarana sanitasi berupa WC sekolah juga telah difasilitasi. Selanjutnya melalui anggaran bantuan provinsi, telah dilaksanakan pengadaan mebel pengganti SD sejumlah 74 sekolah dengan anggaran Rp. 1.520.000.00 dan pengadaan mebel untuk 58 SMP dengan anggaran Rp. 1,180.000.000 yang tersebar di wilayah Kabupaten Wonosobo

Untuk tingkat SMP, telah dialokasikan kegiatan pembangunan prasarana pendidikan bagi 18 SMP, pengadaan buku perpustakaan dan alat kesenian. Melalui dana bantuan provinsi juga telah dilaksanakan rehabilitasi ruang kelas baik SD maupun SMP.

Anggaran bantuan provinsi juga dialokasikan pada upaya peningkatan mutu pembelajaran yang dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan alat peraga kegiatan serta pengadaan alat TIK bagi 35 SD.

Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan pada tahun 2016 dialokasikan untuk kegiatan pengadaan koleksi perpustakaan SD, media pendidikan sekolah, perangkat lunak, peralatan laboratorium bahasa, alat peraga pendidikan, pembangunan jamban, serta rehab ruang dan penambahan kelas baru.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga memberikan perhatian bagi satuan pendidikan swasta dengan memberikan alokasi anggaran untuk rehab ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan senderan dan juga alat-alat penunjang proses pembelajaran.

Kegiatan Kejar Paket A dan Paket B merupakan program pendidikan kesetaraan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan peningkatan kualitas hidup penduduk di Kabupaten Wonosobo. Sasaran kegiatan yang dilaksanakan adalah peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan pada lembaga pendidikan kesetaraan Paket A setara SD dan paket B setara SMP.

Untuk meminimalisir jumlah anak putus sekolah seluruh SD/MI dan SMP/MTs mendapatkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat berdasarkan usulan dari sekolah. Penyaluran BOS dari pemerintah pusat melalui mekanisme transfer langsung ke rekening sekolah. Selain itu Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah juga memberikan anggaran Pendampingan BOS bagi SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs dengan mekanisme penyaluran oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ke rekening sekolah penerima.

IV.B.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan berbagai seleksi dan kompetisi sebagai media bagi para siswa untuk meningkatkan prestasi dan motivasi siswa dilakukan berbagai kompetisi baik yang bersifat akademik dan non akademik seperti Olimpiade Sains Nasional, Festival dan Lomba Seni Nasional (FLS2N) dan Lomba MAPSI bagi siswa SD/MI, Lomba Cerdas Cermat, Lomba Pdato Bahasa Jawa serta Lomba Siswa Berprestasi.

Adapun untuk jenjang SMP/MTs diselenggarakan Lomba Mata Pelajaran, Lomba MAPSI, Cerdas Cermat SMP, Festival dan Lomba Seni Nasional (FLS2N) SMP dan dan Bahasa Inggris SMP. Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) merupakan salah satu sarana peningkatan mutu wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) dan merupakan ajang untuk mencari bibit-bibit siswa berprestasi dalam bidang matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) sebagai calon peserta pada Olimpiade Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional. Kegiatan ini diikuti oleh siswa yang berkompetisi di mata pelajaran Matematika, Biologi, Fisika dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Untuk prestasi non akademis penyelenggaraan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) menjadi wadah bagi siswa SMP untuk menunjukkan kelebihan mereka di seni kriya, vocal group, seni tari, seni baca Al-Qur'an, cipta cerpen Bahasa Indonesia, story telling, festival music tradisional, menyanyi tunggal, seni lukis, cipta puisi, cipta lagu, desain motif batik. Sedangkan bagi siswa yang berbakat di olahraga, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) adalah media bagi peserta didik untuk mengekspresikan potensinya dalam bidang Olahraga. Selain itu, lomba dan pertandingan ini diharapkan dapat meningkatkan atmosfer olahraga yang positif antar sekolah dalam rangka memotivasi dan memberikan pelayanan bagi peserta yang berpotensi dalam bidang olahraga. Terpilihnya para juara cabang olah raga jenjang SMP untuk mewakili Kabupaten Wonosobo ke tingkat Provinsi dan Nasional.

Untuk menekan angka putus sekolah dan menjamin pelayanan pendidikan dasar guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 484 SD/SLB adalah sebesar Rp 58.272.800.000 dan untuk 109 SMP/MTS sebesar Rp 22.771.297.500. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan dana BOS Pendamping untuk SD/MI sebesar Rp 2.737.231.200 dan untuk Rp. 1.797.648.000 untuk jenjang SMP/MTs. BOS Pendamping dibelanjakan untuk membiayai item yang belum dipenuhi oleh BOS APBN.

3) Program Pendidikan Menengah

Upaya Peningkatan akses terhadap pendidikan menengah yang berkualitas selalu diupayakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Pada tahun 2016, Pembangunan Prasarana Pendidikan SMA/SMK baik berupa rehabilitasi ruang kelas baru, senderan maupun penataan lingkungan. Ruang belajar sebagai prasarana

utama proses pembelajaran menjadi perhatian yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kenyamanan siswa,

SMK dibentuk dengan tujuan untuk mencetak calon tenaga kerja tingkat menengah yang memiliki keterampilan dan siap memasuki dunia usaha/dunia industry. Oleh karenanya beberapa kegiatan pendukung diselenggarakan untuk merespon tuntutan pasar tenaga kerja. Kegiatan Career Center yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Wadaslintang, bertujuan untuk meningkatkan layanan pendidikan bermutu pada SMK yang berwujud pendidikan kepada masyarakat, khususnya lulusan SMK dan/atau sederajat sebagai bekal memasuki dunia kerja. Fasilitas Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK diselenggarakan untuk meningkatkan daya serap lulusan pendidikan kejuruan pada dunia usaha dan industri melalui stimulan pembiayaan fasilitas bursa kerja khusus sehingga setelah lulus siswa dapat bekerja di dunia usaha/dunia industry yang kerjasamanya telah terjalin dengan sekolah. SMK Negeri 1 Kepil menerima bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk penyelenggaraan kelas industry. Kelas industri dibentuk untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK yang mempunyai kompetensi sesuai dengan permintaan industri melalui dukungan pembiayaan fasilitas program kelas industri SMK

Untuk meningkatkan partisipasi sekolah pada tingkat menengah telah diselenggarakan Bantuan Beasiswa Siswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu.

Selain untuk jalur pendidikan formal, pemerintah juga mengakomodasi bantuan untuk penyelenggaraan pendidikan non formal setara SMA, yaitu penyelenggaran pendidikan kesetaraan Paket C setara SMA. Bantuan penyelenggaraan Paket C disalurkan yang digunakan oleh lembaga untuk pengadaan bahan belajar, pengadaan alat tulis dan biaya transportasi tutor.

Perhatian pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan menengah adalah dengan menyalurkan anggaran untuk pembangunan prasarana sekolah dengan bersumber dari APBD Murni. Selain itu untuk menjaga keamanan lingkungan sekolah dan warga sekolah, pembangunan senderan dan pagar keliling sekolah menjadi salah satu prioritas. pengadaan alat laboratorium juga diselenggarakan terutama untuk laboratorium bahasa dan multimedia.

Berdasarkan UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan SAM/SMK menyangkut tata kelola dan manajemen pendidikan menjadi kewenangan provinsi yang secara resmi akan diimplementasikan pada awal Januari 2017. Penyerahan pengelolaan itu meliputi tiga hal, yakni aset, Sumber Daya Manusia (SDM) serta pelimpahan aset SMA/SMK dari Kabupaten Kota kepada Propinsi. Pada tahun 2016, proses pendataan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) sudah dilakukan. Dengan pengalihan kewenangan ini, harapannya adalah agar pemerintah daerah lebih fokus menangani urusan pendidikan sesuai kewenangannya, keseragaman kebijakan pendidikan serta tidak ada ketimpangan antar daerah.

4) Program Pendidikan Non Formal

Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dimaksud dengan pengertian pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Tujuan Program Pendidikan Non Formal (PNF) adalah meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan keaksaraan usia 15 tahun ke atas dengan berbasis pemberdayaan, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Selain itu layanan PNF ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan kecakapan hidup, kursus dan pelatihan serta pendidikan kewirausahaan yang bermutu dan berdaya saing serta relevan dengan kebutuhan pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, khususnya bagi penduduk putus sekolah dalam dan antar jenjang sehingga dapat bekerja dan atau berusaha secara produktif, mandiri dan profesional. Beberapa kegiatan yang didanai dalam program ini antara lain pembangunan ruang kelas untuk AGAPE, pembangunan taman belajar AL Salaf Kalianget dan pembangunan gedung PKBM Wonokasian Kecamatan Leksono.

Pendidikan keaksaraan merupakan metode dalam pendidikan non formal untuk meningkatkan angka melek huruf. Keaksaraan (Literacy) secara sederhana diartikan sebagai kemampuan untuk membaca, menulis dan berhitung. Bagi orang dewasa yang buta aksara, kecakapan keaksaraan tidak hanya sekedar dapat membaca, menulis dan berhitung, akan tetapi lebih menekankan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan keaksaraan mencakup keaksaraan dasar, keaksaraan usaha mandiri, keaksaraan keluarga dan keaksaraan komunitas khusus. Untuk keaksaraan dasar 8 (delapan) organisasi mitra PNF mendapatkan bantuan untuk kegiatan pendidikan keaksaraan dasar. Keaksaraan dasar adalah upaya pemberian kemampuan keaksaraan bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, mendengarkan, dan berbicara untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia

Upaya untuk meningkatkan literasi dilakukan juga dengan pengembangan Taman Baca Masyarakat (TBM). TBM merupakan upaya meningkatkan akses bahan-bahan bacaan bagi masyarakat dan melayani kegiatan membaca dan menulis bagi masyarakat. Pada tahun 2016 sesuai ketentuan, kegiatan fasilitasi pendidikan non formal dalam belanja langsung telah dialihkan ke belanja tidak langsung melalui belanja hibah. Pada tahun 2016 ini sebanyak 850 penduduk telah mendapatkan sertifikat Surat Melek Aksara atau SUKMA dan 200 orang mendapatkan sertifikat kelayakan mengikuti pendidikan lanjutan kejar paket A di 10 Kecamatan yaitu Sapuran, kepil, Wadaslintang, Kaliwiro, Selomerto, Kalikajar, Kertek, Watumalang, Garung dan Sukoharjo.

5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik maupun kependidikan, setiap tahun diadakan pemilihan guru berprestasi dan pengawas berdedikasi secara berjenjang mulai tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Kabupaten mengadakan seleksi untuk menentukan guru yang mewakili ke tingkat provinsi sehingga terpilih wakil guru prestasi untuk jenjang TK, SD, SMP, SLTA, tutor PNF ke provinsi. Untuk menunjang keberhasilan program ini kegiatan Gelar Prestasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan diselenggarakan, sehingga dapat terpilih wakil dari Kabupaten Wonosobo yang berprestasi sampai dengan tingkat Nasional. Melalui pemilihan ini diharapkan dapat menambah minat guru dan tutor untuk berkompetisi dan meningkatkan kinerja dalam kerangka profesionalitas guru.

Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP SMA/SMK dilakukan dengan penyelenggaraan bintek dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sebagai ilustrasi untuk jenjang PAUD, pelatihan dikonsentrasikan pada pengembangan kurikulum dan manajemen pengelolaan PAUD, dimana masih cukup banyak lembaga PAUD yang pengelolannya belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Untuk jenjang SMA/SMK focus pelatihan terbagi pada manajemen sekolah, penelitian tindakan kelas dalam rangka merespon system penilaian kinerja guru, pengelolaan perpustakaan dan pengelolaan laboratorium.

6) Program Manajemen Pendidikan

Tata kelola pelayanan urusan pendidikan menjadi salah satu indikator mutu penopang keberhasilan pembangunan pendidikan. Melalui Kegiatan Optimalisasi Manajemen Informasi dan Pendataan Pendidikan dalam bentuk sistem informasi suatu sistem pendataan dan pengelolaan data-data pendidikan yang bersifat mikro secara online dan real time. Terdapat 3 (tiga) jenis data utama pendidikan yang dikelola pada sistem dapodik, meliputi: data sekolah, data siswa dan data guru/karyawan. Sistem Dapodik dirancang bangun menggunakan basis open source dengan menerapkan sistem database terpusat dan aplikasi berbasis web. Dengan sistem tersebut maka pengelolaan riwayat data sekolah, siswa, guru/karyawan lebih mudah diintegrasikan dan disimpan secara terpusat dan dapat diakses dengan lebih mudah dan terbuka oleh masyarakat dalam batasan tertentu melalui internet. Selain itu proses pemutakhiran data dapat dilakukan secara langsung online dan real time oleh setiap Dinas Pendidikan baik di tingkat propinsi, kota atau kabupaten di seluruh Indonesia memanfaatkan koneksi internet.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi pendidikan baik tingkat dasar maupun menengah melalui jalur sekolah formal telah dilaksanakan kegiatan kemitraan wajib belajar 12 tahun berupa fasilitasi forum group discussion di 15 kecamatan yang diikuti oleh para guru, kepala desa/kelurahan dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan dan pemetaan solusi peran dan tanggung jawab baik lembaga

sekolah maupun pemerintah desa/kelurahan maupun kecamatan dalam rangka meningkatkan angka melanjutkan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah bagi penduduk usia 15 tahun keatas, pada tahun 2016 telah dimulai upaya – upaya fasilitasi dan peningkatan motivasi bagi orang tua dan masyarakat untuk mengikuti pendidikan non formal terutama bagi penduduk usia produktif.

Keberadaan anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Wonosobo juga menjadi perhatian melalui fasilitasi sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sekolah yang menggabungkan layanan pendidikan khusus dan reguler dalam satu sistem persekolahan, dimana siswa berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan khusus sesuai dengan potensinya masing-masing dan siswa reguler mendapatkan layanan khusus untuk mengembangkan potensi mereka sehingga baik siswa yang berkebutuhan khusus ataupun siswa reguler dapat bersama-sama mengembangkan potensi masing-masing dan mampu hidup eksis dan harmonis dalam masyarakat. Meskipun beberapa sekolah telah ditetapkan sebagai sekolah inklusi, ada beberapa siswa berkebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan sekolah formal diluar sekolah yang ditunjuk karena alasan keterjangkauan. Untuk itu pada tahun 2016 dilaksanakan kegiatan penguatan pendidikan inklusi bagi guru SD,SMP dan SMA yang memiliki siswa berkebutuhan khusus dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan bagi guru dalam menstimulasi siswa berkebutuhan khusus. Harapannya dengan menambah jumlah guru terlatih semakin banyak sekolah yang bisa menerima anak- anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah formal. Sekolah yang telah mengikuti pelatihan juga didorong untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang akses sekolah bagi anak berkebutuhan khusus sehingga tidak ada lagi anak- anak yang tidak bersekolah.

Untuk mengapresiasi keberhasilan peserta didik, pendidik, satuan pendidikan serta penyelenggara pendidikan dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Wonosobo, telah dilaksanakan Festival Pendidikan Teknologi dan Informasi Tahun 2016 yang dikemas dalam acara edutechfest sebagai festival edukasi ilmu pengetahuan dan teknologi, memberi ruang dan wawasan kepada pelajar, pendidik maupun masyarakat umum dalam mengembangkan diri terutama dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan ini diisi dengan workshop robotik bagi siswa/siswi SD dan SMP/SMA, workshop cerdas bermedsos dengan narasumber staf ahli kepresidenan dan dosen UIN Yogyakarta, workshop pengenalan TIK, lomba mading digital, lomba cerdas cermat digital serta lomba komik strip.

7) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyelenggaraan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas dan pelayanan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diampu. Anggaran untuk program ini dimanfaatkan untuk kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan

dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penyelesaian pekerjaan kantor dan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan.

8) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini mencakup pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor, pengadaan meubelair, pengadaan sarana penunjang pelaksanaan pekerjaan seperti komputer, scanner dan printer.

c. **Capaian Kinerja Urusan Pendidikan**

Uraian capaian kinerja urusan pendidikan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel IV.B.1.2
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan
Berdasarkan IKK Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

No.	Indikator Kinerja Kunci EKPPD	Capaian Kinerja	
		2015	2016
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	66,05	$\frac{27.994}{40.864} = 68,51$
2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,87%	$\frac{478.795}{484.062} = 98,91$
3	Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI/Paket A	94,23	$\frac{76.103}{79.701} = 95,49$
4	Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/MTs/PaketB	75,71	$\frac{31.920}{39.393} = 81,03$
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MAN/Paket C	34,47	$\frac{15.678}{38977} = 40,22$
6	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,08	$\frac{159}{87.036} = 0,18$
7	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,27	$\frac{240}{36.949} = 0,65$
8	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	1,39	$\frac{283}{20.319} = 1,39$
9	Angka Kelulusan(AL)SD/MI	99,23	$\frac{23996}{23996} = 100$

IV.B.1. **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan**

No.	Indikator Kinerja Kunci EKPPD	Capaian Kinerja	
		2015	2016
10	Angka Kelulusan(AL)SMP/MTs	100	$\frac{11503}{11521} = 99,84$
11	Angka Kelulusan(AL)SMA/SMK/MA	96,98	$\frac{5940}{5948} = 99,87$
12	Angka Melanjutkan (AM)dari SD/MI ke SMP/MTs	93,22	$\frac{12.659}{13.765} = 91,97$
13	Angka Melanjutkan (AM)dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	74,1	$\frac{8.136}{11.503} = 70,73$
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	68,44	$\frac{9693}{10820} = 89,58$
15	Indikator tambahan: Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,11	6,11* (2015)

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Tabel IV.B.1.3
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2016
Berdasarkan Indikator RPJMD 2016-2021

No	Indikator Capain	Capain Kerja 2015	Capain Kerja 2016
1	APM SD	94,23	95,49
2	APK SD	103,92	107,38
3	APM SMP	75,71	81,03
4	APK SMP	100,3	96,31
5	Angka Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun	86,4	97,2
6	Angka Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun	95,69	97,23
7	Angka Putus Sekolah SD	0,08	0,18
8	Angka Putus Sekolah SMP	0,27	0,65
9	Rasio APK SMP penduduk usia sekolah 20% penduduk termiskin dibanding 20% terkaya	DTD	0,81
10	Angka Kelulusan (AL) SD	99,23	100
11	Angka Kelulusan (AL) SMP	100	99,84
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP	93,22	91,97
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	74,1	70,73
14	Persentase ruang kelas SD yang memenuhi standar nasional pendidikan	66%	70%
15	Persentase ruang kelas SMP yang memenuhi standar nasional pendidikan	76%	78%

IV.B.1. **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan**

No	Indikator Capain	Capain Kerja 2015	Capain Kerja 2016
16	Persentase indeks nilai sikap siswa kategori baik	75%	80%
17	% PAUD formal yang terakreditasi	10%	20%
18	APK PAUD	37,34	39
19	Persentase SMK minimal berakreditasi B	55%	55%
20	Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi	6,80%	10%
21	Angka Melek Huruf Penduduk 15 -45 Tahun	98,3	98,9
22	Persentase pendidik SD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	74,12	87,18
23	Persentase pendidik SMP dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	94,07	91,46
24	Persentase pendidik PAUD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4	48%	46,71%
25	persentase SD berakreditasi B	82%	83%
26	Persentase SMP Minimal Berakreditasi B	79%	80%
27	Persentase SMA minimal berakreditasi B	80,90%	82%
28	Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD	7,12	7,18
29	Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SMP	6,25	6,38
30	Rata - rata nilai ujian sekolah SMA	6	6,2
31	Persentase sekolah SD yang menerapkan sistem inklusi	0,69%	0,85%
32	Persentase sekolah SMP yang menerapkan sistem inklusi	1,43%	1,43 %
33	Persentase Sekolah yang website aktif	30%	50%
34	Rasio Guru / Murid SD (jumlah guru PNS SD per 1000 murid SD)	42,87	42,87
35	Rasio Guru / Murid SMP (jumlah guru PNS SMP per 1000 murid SMP)	35	35
36	Rasio Guru/ Murid SMA (jumlah guru PNS SMA per 1000 murid SMA)	40	40
37	Persentase Sekolah Ramah Anak	0	1,06%
38	Persentase kompetensi keahlian SMK minimal berakreditasi B	55%	60%
39	Persentase ruang kelas SMA yang memenuhi standar nasional pendidikan	86%	88%
40	Angka Partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun	43,66	57,15%
41	Persentase indeks nilai sikap siswa SMA kategori baik	75%	76%
42	Rasio APK SMA penduduk usia sekolah 20% penduduk termiskin dibanding 20% terkaya	0,52	0,55

Secara umum capaian kinerja urusan pendidikan terdapat peningkatan. Angka Partisipasi Kasar jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada kategori TK/RA

mengalami kenaikan yang signifikan. Pendidikan PAUD yang oleh sebagian masyarakat masih diabaikan mulai dirasakan manfaatnya untuk menghadapi persiapan ke jenjang sekolah dasar, sehingga secara bertahap APK PAUD meningkat. Meningkatnya animo masyarakat untuk mengikutsertakan anak-anaknya dalam pendidikan PAUD ini sejalan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan usia dini diantaranya melalui peningkatan sarana dan prasarana PAUD baik negeri maupun swasta, bantuan alat permainan edukatif serta penyelenggaraan kegiatan kreativitas bagi peserta didik PAUD maupun apresiasi bagi bunda PAUD.

Capaian Angka Partisipasi Murni atau APM pada jenjang pendidikan dasar mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada jenjang SD APM meningkat dari 94,23 menjadi 95,49 pada tahun 2016 dan pada jenjang SMP/MTs APM meningkat 7 % dari tahun sebelumnya menjadi 81,03. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak usia pendidikan dasar yaitu SD dan SMP sebagian besar sudah memasuki sekolah sesuai usia yang ditetapkan. Angka Partisipasi sekolah yang menunjukkan jumlah anak usia sekolah yang sedang mengenyam pendidikan juga mengalami peningkatan. Pada tingkat usia 7-12 tahun hanya 2,77% saja yang tidak bersekolah karena putus sekolah atau sebab lain. Pada usia 13-15 partisipasi sekolah telah mencapai 97,2. Namun demikian, angka putus sekolah juga masih terjadi pada siswa usia sekolah pendidikan dasar. Pada tahun 2015 angka putus sekolah usia SD adalah sebesar 0,08 dan meningkat menjadi 0,18 pada tahun 2016, sedangkan untuk usia SMP angka putus sekolah sebesar 0,65 meningkat dibandingkan tahun 2015. Peningkatan ini terjadi karena perbedaan perhitungan angka putus sekolah dimana pada tahun 2015 angka pembagiannya adalah jumlah siswa yang bersekolah sedangkan pada tahun 2016 angka pembagiannya adalah jumlah penduduk usia sekolah.

Pelaksanaan ujian sekolah di jenjang SD/MI/Paket A dan ujian nasional jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK masih merupakan metode untuk mengukur hasil proses pembelajaran. Terjadi peningkatan angka kelulusan di tingkat SD dan SMA sedangkan di tingkat SMP angka kelulusan menurun. Keberhasilan kualitas pendidikan juga ditunjukkan dengan peningkatan nilai rata-rata ujian sekolah maupun ujian nasional.

Keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan ditunjukkan dengan diraihnya prestasi oleh siswa dan siswi baik dalam lomba-lomba dibidang akademik dan non akademik baik di tingkat provinsi, nasional dan internasional. Beberapa prestasi yang berhasil diraih siswa-siswi di Kabupaten Wonosobo antara lain : Alfandani Iqbal Putra dari SDLB Karya Bhakti Wonosobo berhasil meraih juara 1 tingkat provinsi dan nasional pada lomba melukis SDLB di tahun 2016 sedangkan Yesika Ayu Daraningrum dari SDLB Dena Ukapara meraih juara 1 tingkat provinsi lomba desain grafis. Pada tingkat SMA, Satya Lathifa Putra mewakili delegasi Indonesia dalam Sakura Programme (Program Pelajar ke Jepang). Di bidang olimpiade sains Dema Tata Laksana berhasil meraih medali perak dalam lomba OSN tingkat nasional sedangkan Cristina SetiaNingrum berhasil memperoleh juara 2 dalam lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional. Bintang Mega Pratiwi berhasil memperoleh medali emas dalam Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa

IV.B.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Indonesia FIKSI Boga. Untuk tingkat pendidik Sri Endah Setiarini, S.Pd, M.Si menjadi juara favorit dalam lomba menulis artikel tingkat nasional. Predikat sebagai kepala sekolah terbaik tingkat Jawa Tengah juga telah berhasil diraih oleh Nurul Hidayati dari SD N 1 Wonosobo. Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) pada tahun 2016, Kabupaten Wonosobo meraih angka rata- rata UKG sebesar 63,89 jauh diatas rata- rata nasional 56,69 dan rata – rata provinsi Jawa Tengah sebesar 56,69.

Sejalan dengan gerakan revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, Kemendikbud memperkenalkan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya perilaku jujur dan berintegritas bagi para para pelaku ujian nasional. Untuk Kabupaten Wonosobo rata- rata indeks integritas UN tingkat SMP mencapai 82,4 atau diatas rata- rata provinsi dan nasional. Pada jenjang SMA untuk masing- masing mata pelajaran yang diujikan baik IPA, IPS maupun tingkat SMK juga meraih indeks yang melebihi angka provinsi dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kejujuran pelaksanaan UN di Kabupaten Wonosobo sudah semakin baik.

Dukungan anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten untuk urusan pendidikan terus mengalami peningkatan yang signifikan. Memenuhi amanat Undang-undang dan komitmen pemerintah akan pemenuhan kebutuhan dasar, tahun 2016 anggaran pendidikan urusan pendidikan mencapai mencapai 38 % dari total APBD Kabupaten Wonosobo.

Upaya pemerintah dalam memenuhi sarana dan prasarana sekolah ditunjukkan dengan peningkatan persentase ruang kelas yang telah memenuhi standar nasional dan berakreditasi minimal B. Pada tahun 2016 persentase ruang kelas SD yang memenuhi standar nasional pendidikan sebesar 70% sedangkan pada tingkat SMP 78%. Dari sisi tenaga pendidik, persentase tenaga pendidikan dengan kualifikasi pendidikan DIV/S1 dan bersertifikat pendidik pada tingkat SD mengalami peningkatan dari 74,12 % pada tahun 2015 menjadi 87,18% pada tahun 2016., namun untuk tingkat SMP dan SMA mengalami penurunan karena guru dengan kualifikasi S1/DV dan bersertifikat pendidik telah memasuki purna tugas.

Rata- rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas pada tahun 2015 di Kabupaten Wonosobo masih rendah yaitu 6,11 tahun yang artinya sebagian besar penduduk di usia 25 tahun ke atas hanya menikmati pendidikan sampai dengan kelas 1 SMP. Perlu upaya keras dan kerjasama berbagai pihak untuk dapat meningkatkan rata- rata lama sekolah karena bukan merupakan hal yang mudah dan instan. Dari sisi penyediaan sarana sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang dapat terjangkau bagi masyarakat baik formal maupun non formal serta motivasi dan kemauan yang tinggi dari orang tua dan peserta didik untuk secara sadar untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pada Tahun 2016 telah dilaksanakan Kegiatan Roadshow Bupati/Wakil Bupati di 15 kecamatan yang bertujuan untuk meningkatkan peran dan perhatian dari pemerintah kecamatan, desa dan pihak sekolah serta tokoh masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.

Upaya meningkatkan partisipasi pendidikan juga telah menjadi perhatian pemerintah desa dengan mengalokasikan sebagian dana transfer untuk kegiatan fasilitasi bagi siswa yang kurang mampu dalam bentuk pemberian beasiswa, bantuan alat sekolah, seragam dan pemberian stimulan bagi siswa berprestasi. Bahkan sesuai kewenangannya desa telah mengalokasikan anggaran untuk fasilitasi lembaga PAUD yang ada di desanya.

d. Permasalahan dan Solusi

Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan pendidikan antara lain :

Tabel IV.B.1.4
Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan

Permasalahan	Solusi
1. Belum meratanya kualitas dan kompetensi guru	Melakukan pemerataan kompetensi guru melalui pemetaan, penyebaran dan rotasi guru serta peningkatan kompetensi.
2. Rendahnya motivasi siswa dan masyarakat untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi	• Melakukan upaya peningkatan motivasi masyarakat melalui pemberian beasiswa • Kolaborasi dengan masyarakat berprestasi di wilayah setempat untuk pemberian motivasi pentingnya pendidikan. • Meningkatkan kerjasama dan berbagi peran antara pemerintah, sekolah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasi sekolah. • Memperluas jangkauan pendidikan kesetaraan untuk menjaring masyarakat usia non sekolah mengenyam pendidikan lebih tinggi.
3. Masih rendahnya kualitas lembaga pendidikan masyarakat	Mendorong dan memfasilitasi akreditasi lembaga pendidikan masyarakat
4. Masih minimnya sekolah inklusi baik jenjang SD,SMP maupun SMA karena keterbatasan jumlah guru yang terlatih.	Menambah jumlah guru yang terlatih baik di sekolah inklusi maupun di sekolah yang memiliki siswa berkebutuhan khusus melalui pelatihan.
5. Kemampuan pengoperasian komputer di tingkat sekolah masih rendah.	Mengintegrasikan mata pelajaran TIK dalam pembelajaran umum.